

BAGIAN ANGGARAN 065



LAPORAN KEUANGAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2014 (AUDITED)

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya.

Badan Koordinasi Penanaman Modal adalah salah satu entitas pelaporan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Koordinasi Penanaman Modal mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Badan Koordinasi Penanaman Modal. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, April 2015

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Franky Sibarani

RINGKASAN

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 55 ayat (2) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2014 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2014.

Realisasi Pendapatan Negara pada periode TA 2014 seluruhnya merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp3.065.701.477,00. Tidak terdapat estimasi pendapatan pada TA 2014 dalam DIPA BKPM, namun setiap penerimaan Negara yang diterima tetap disetorkan ke Kas Negara dan dibukukan sebagai pendapatan. Adapun Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp3.065.701.477,00 diperoleh dari pendapatan atas pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), pendapatan denda, dan pendapatan penerimaan dari setoran Tahun Anggaran yang Lalu (TAYL).

Realisasi Belanja Negara pada periode TA 2014 adalah sebesar Rp527.128.374.747,00 atau mencapai 91,80 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp574.236.381.000,00.

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014
DAN 31 DESEMBER 2013**

No	URAIAN	Catatan	2014			2013
			ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	REALISASI
1	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH					
	1. Penerimaan negara Bukan Pajak	B.1.	-	3.065.701.477	0,00	905.594.310
	Jumlah Pendapatan dan Hibah		-	3.065.701.477	0,00	905.594.310
2	BELANJA NEGARA	B.2.				
2.1	Belanja Transaksi Kas	B.2.1	574.236.381.000	523.386.693.167	91,14	593.794.646.736
	1. Belanja Pegawai	B.2.1.	76.532.983.000	72.396.363.607	94,59	63.840.281.902
	2. Belanja Barang	B.2.2.	488.180.882.000	442.605.610.180	90,66	482.694.089.961
	3. Belanja Modal	B.2.3.	9.522.516.000	8.384.719.380	88,05	47.260.274.873
2.2	Belanja Transaksi Non Kas	B.2.2	-	3.741.681.580	0,00	13.378.205.250
	1. Belanja Barang	B.2.2.1	-	3.741.681.580	0,00	13.334.891.250
	2. Belanja Modal	B.2.2.2	-	-	0,00	43.314.000
	Jumlah Belanja		574.236.381.000	527.128.374.747	91,80	607.172.851.986

Penjelasan :

Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai pada periode TA 2014 dibandingkan dengan Belanja Pegawai Tahun 2013 adalah masing-masing sebesar Rp72.396.363.607,00 dan Rp63.840.281.902,00. Terdapat kenaikan realisasi Belanja Pegawai sebesar 13,40 persen yang antara lain disebabkan oleh adanya penambahan jumlah pegawai baru dan kenaikan pangkat/golongan pegawai.

Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang pada periode TA 2014 dan TA 2013 adalah masing-masing sebesar Rp442.605.610.180,00 dan Rp482.694.089.961,00.

Penurunan realisasi Belanja Barang sebesar 8,31 persen antara lain disebabkan adanya efisiensi penggunaan belanja barang non operasional, belanja jasa dan belanja pemeliharaan serta penghematan anggaran perjalanan dinas dalam dan luar negeri.

Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal pada periode TA 2014 dan TA 2013 adalah masing-masing sebesar Rp8.384.719.380,00 dan Rp47.260.274.873,00. Penurunan realisasi Belanja Modal sebesar 82,26 persen lebih dikarenakan perubahan alokasi pagu anggaran Tahun 2014, dimana BKPM tidak lagi menganggarkan belanja pembangunan Gedung dan Bangunan serta adanya pengurangan alokasi pagu belanja modal peralatan dan mesin dan belanja modal lainnya.

Anggaran dan Realisasi Belanja Berdasarkan Program

Selain hal tersebut di atas, dapat diinformasikan pula bahwa Belanja Transaksi Kas Tahun 2014 dilihat berdasarkan program, menunjukkan informasi sebagai berikut :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja menurut Program Kerja TA 2014

Kode	Uraian Program Kerja	Anggaran (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
065.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKPM	164.539.020.000	151.351.188.479	91,98
065.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BKP	3.954.323.000	3.287.946.900	83,15
065.01.06	Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal	405.743.038.000	368.747.557.788	90,88
Jumlah		574.236.381.000	523.386.693.167	91,14

Realisasi Belanja Transaksi Kas pada periode TA 2014 adalah sebesar Rp523.386.693.167,00 atau mencapai 91,14 persen dari anggarannya. Realisasi belanja tersebut merupakan realisasi belanja netto setelah dikurangi dengan pengembalian belanja sebesar Rp1.163.820.262,00 yang dibukukan sebagai kontra pos realisasi belanja pada periode tahun anggaran yang sama.

II. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada 31 Desember 2014 dan 2013.

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Nilai Aset per 31 Desember 2014 dicatat dan disajikan sebesar Rp707.634.995.563,00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp15.198.245.224,00, Aset Tetap sebesar Rp594.066.860.569,00, dan Aset Lainnya sebesar Rp98.369.889.770,00.

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp7.788.901.756,00 yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek.

Sementara itu nilai Ekuitas Dana adalah sebesar Rp699.846.093.807,00 yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp7.409.343.468,00 dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp692.436.750.339,00.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2014 dan 2013 dapat disajikan sebagai berikut :

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2014 dan 2013

NAMA PERKIRAAN	Tanggal neraca		Kenaikan/(Penurunan)	
	31 Des 2014 (Rp)	31 Des 2013 (Rp)	Rp	%
ASET				
Aset Lancar	15.198.245.224	13.554.016.749	1.644.228.475	12,13
Aset Tetap	594.066.860.569	584.069.343.979	9.997.516.590	1,71
Aset Lainnya	98.369.889.770	94.627.521.270	3.742.368.500	3,95
Jumlah Aset	707.634.995.563	692.250.881.998	15.384.113.565	2,22
KEWAJIBAN				
Kewajiban jangka Pendek	7.788.901.756	1.536.229.409	6.252.672.347	407,01
EKUITAS DANA				
Ekuitas Dana Lancar	7.409.343.468	12.017.787.340	(4.608.443.872)	(38,35)
Ekuitas Dana Investasi	692.436.750.339	678.696.865.249	13.739.885.090	2,02
Jumlah Ekuitas Dana	699.846.093.807	690.714.652.589	9.131.441.218	1,32
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	707.634.995.563	692.250.881.998	15.384.113.565	2,22

III. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas Laporan Keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

Dalam penyajian Neraca untuk periode per tanggal 31 Desember 2014, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI (BPK RI)

I. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI

Berdasarkan Surat Tugas Nomor : 25/ST/IV-XV/01/2015 tanggal 30 Januari 2015, Badan Pemeriksa Keuangan R.I. telah melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Tahun Anggaran 2014 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan BKPM dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan anggaran.

II. Opini BPK RI

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, BPK RI memberikan opini "Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)" dalam semua hal yang material posisi keuangan BKPM tanggal 31 Desember 2014, serta realisasi anggaran untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

III. Tindak Lanjut atas Rekomendasi BPK RI

Dalam rangka meningkatkan kualitas Laporan Keuangan BKPM, BPK RI memberikan rekomendasi yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran. Terhadap rekomendasi tersebut BKPM telah melakukan tindak lanjut sebagaimana mestinya.